



MAKALAH

Teori Queer dan Demokrasi ¹

Rocky Gerung

It is not difference which immobilizes us, but silence. And there are so many silences to be broken.

Audre Lorde, *Sister Outsider*¹

1

Kewarganegaraan adalah kerangka interaksi politik modern. Di dalamnya kesetaraan hak warganegara dijamin. Terhadap kesejahteraan, tanggung jawab negara dituntut aktif. Yaitu dengan menyediakan kondisi minimal bagi pemenuhan kebutuhan hidup layak warga. Kini, konsep kewarganegaraan itu bertumbuh mengikuti kebutuhan-kebutuhan baru konsep kesejahteraan. Demokrasi yang biasanya melayani debat kebijakan berdasarkan parameter "keadilan publik", kini ditantang untuk meradikalisir konsep "keadilan" sehingga mampu mengenali pengalaman-pengalaman baru dalam wilayah privat hak-hak seksual. Terhadap perluasan konsep kesejahteraan itu, yaitu yang mencakup soal-soal selain kebutuhan material, negara diminta untuk minimal bersikap netral. Artinya, preferensi-preferensi privat warganegara dalam menikmati pengalaman hidupnya harus dihormati negara. Kemajemukan keyakinan hidup dan etika individual yang tumbuh dalam pilihan-pilihan bebas warganegara, adalah fakta yang harus bebas dari evaluasi negara. Negara, minimal harus pasif dalam soal-soal itu.

Dalam debat paradigmatis menyangkut perebutan identitas sosial dan kebudayaan, sistem demokrasi diuji: Sanggupkah sistem itu menjamin wilayah kemerdekaan warganegara agar keragaman pengalaman individu dapat dinikmati sepenuhnya.

¹ Dibawakan dalam acara kuliah umum seksualitas dalam peringatan *International Day Against Homophobia (IDAHO)* di ruang Selo Soemardjan Media Center, Fisip Universitas Indonesia Depok, 17 Mei 2013. Penulis adalah dosen filsafat, Universitas Indonesia.

¹ Dikutip oleh Jana Sawicki, *Foucault and Feminism: Toward a Politics of Difference*, dalam Mary Lyndon Shanley & Carole Pateman, *Feminist Interpretations and Political Theory*, Oxford, Blackwell, 1991, hal. 217

Negara dalam debat itu hanya bertugas memastikan bahwa tidak ada kekerasan pada tingkat apapun, boleh berlangsung diantara para peserta debat. Artinya, setiap ekspresi warganegara adalah berstatus sekuler, dan karena itu semua debat moral harus diucapkan dalam kondisi kesosialan suatu argumen. Inti dari pikiran ini adalah bahwa esensialisme tidak boleh menetap dalam sistem demokrasi. Teori queer mengujinya melalui proposal politik seksualitas tubuh.

Paham pascastrukturalis membantu mengungkapkan bahwa kekuasaan telah mengoperasikan konsep tubuh melalui pandangan esensialis. Tubuh dan pengalaman ketubuhan telah lama menjadi obyek pengaturan kebudayaan. Terutama dalam soal seksualitas, tubuh telah didisiplinkan mengikuti pandangan-pandangan esensialis dalam doktrin keagamaan dan kebudayaan. Teori kewarganegaraan modern telah berusaha meluaskan konsep hak-hak politik untuk mencapai wilayah pengakuan baru terhadap hak dan pengalaman ketubuhan. Konsep ini berimpit dengan teorisasi mengenai kritik "identitas". Dalam kaitannya dengan konsep tubuh, pencairan pandangan esensialis itu menghasilkan desakralisasi tubuh. Pokok pikirannya adalah bahwa tubuh merupakan sumber pengalaman otentik manusia. Pengetahuan dan etika tumbuh dari diskursus tubuh. Karena itu, pengendalian politik tubuh bertentangan dengan harkat fenomenologis tubuh. Sesungguhnya, tubuh itu sangat cerdas. Dia mampu bertransformasi, beradaptasi dengan kondisi baru, lalu menghasilkan pengetahuan, nilai, dan etika baru. Karena itu, transformasi identitas tubuh -secara psikis, gender, atau legal- adalah bagian dari daya adaptabilitas tubuh dalam upayanya mendapatkan kondisi eksistensial yang maksimal bagi dirinya. Dalam konteks ini, seksualitas adalah pengalaman eksistensial, yang seharusnya memperkaya keberagaman pengalaman warganegara. Itulah proposal politik queer.

2

Setelah berhasil mengakomodir tuntutan-tuntutan "*politics of recognition*" (etnis, gender, minoritas group), demokrasi ternyata masih terus dikejar oleh "*queer politics*" (yaitu kumpulan kepentingan dalam soal orientasi seksual)². Persoalannya adalah bagaimana demokrasi menerima pilihan privat orientasi seksual individu (lesbian, gay, bisexual transgender, intersex, queer), sehingga praktek kewarganegaraan tidak lagi bersikap diskriminatif terhadap kelompok ini. Atau lebih tepat: bagaimana demokrasi memperkaya konsep partisipasi politiknya dengan mengenali relasi-relasi kehidupan yang 'dinilai abnormal' itu. Seberapa terbuka horison demokrasi terhadap nilai-nilai kewarganegaraan baru?

Bila pada "*politics of recognition*" isunya adalah tuntutan minoritas terhadap keterbukaan institusi sosial untuk diakses secara sama berdasarkan suatu isu keadilan sosial, maka pada *queer politics*, isunya menjadi sangat spesifik, yaitu pengakuan atas pilihan orientasi seksual. Ini berarti suatu tuntutan politik untuk

² Istilah "*queer theory*" menjadi bidang studi penting sejak konferensi tahun 1990 di University of California, Santa Cruz. Lihat pada Peter Barry, *Beginning Theory*, Manchester University Press, 2002, hal 143.

memasukkan soal *intimacy* ke dalam paham *citizenship*, agar pengalaman *intimacy* itu tidak sekedar bereksistensi (dan terintimidasi) di dalam "*epistemology of the closet*"³ (yaitu lokasi *intimacy* homoseksual). Pada tingkat ini, *queer politics* menantang radikalisme konsep pluralisme dalam demokrasi, menuju pada manifestasi sebuah politik "*post identity*". Jalan pikirannya adalah: bila demokrasi merupakan ruang orientasi falibilis, yaitu fasilitas yang menolak semua klaim identitas yang final (entah atas dasar kultur, agama, ideologi, biologi, seksualitas), maka semua dikotomi sosial dan seksual juga harus dibatalkan agar tidak menimbulkan hirarki nilai dalam percakapan politik warganegara, yang pada gilirannya menimbulkan hirarki kuasa. Di belakang jalan pikiran ini bekerja suatu proyek politik "*post identity*", yaitu pandangan bahwa konsep "subjek", "self", sesungguhnya tidak memiliki otonomi didalam dirinya sendiri, sehingga setiap upaya untuk mendefinisikan "subyek" ke dalam suatu konstruksi identitas akan membuat demokrasi kehilangan "*fluidity*" nya. Di dalam filsafat, tema ini merujuk pada kajian-kajian poststrukturalis-dekonstruksi, yang pada intinya mengambil sikap skeptis pada semua upaya memberi fondasi bagi demokrasi. Argumen dasarnya adalah: pengetahuan kita tidak pernah tiba pada kebenaran referensial. Artinya, apa yang kita tahu hanyalah merupakan hasil dari cara pandang kita. Jadi pengetahuan kita sebetulnya adalah sebatas cara pandang itu, dan bukan memiliki referensi obyektif. Bahkan lebih dari itu, yang kita sebut "subyek" (self yang beridentitas) adalah cuma "buatan" sebuah cara pandang. Juga konsep "manusia" adalah hasil pendefinisian sebuah cara pandang. Cara pandang itu adalah sepenuh-penuhnya pekerjaan bahasa (yang memiliki sistem pemaknaan otonom), bukan pekerjaan manusia sebagai subyek⁴.

Jadi, karena kita tidak tahu bagaimana cara pandang itu menyusun pengetahuan kita, maka kita sebetulnya hanya mampu berorientasi dalam "kesementaraan final", yaitu dengan membuka semua kemungkinan. Dengan kata lain, semua klaim tentang pengetahuan yang "benar" menjadi klaim yang ideologis semata-mata, dan dapat menjadi tindakan politik koersif bila dia berubah menjadi kebencian terhadap cara pandang lain. Berlawanan dengan obsesi finalitas itu, demokrasi dituntut terus untuk bersikap anti-finalitas. Demokrasi sesungguhnya hanyalah medan interpretasi yang serba sementara. Radikalisme inilah yang sedang diuji oleh "*queer politics*".

3

Sumbangan teoretis lesbianisme terhadap radikalisme demokrasi terletak pada proyek de-esensialisasi. Demokrasi harus mencapai tingkat de-esensialisasi, baru ia dapat menjadi sarana kesetaraan warganegara. Prinsip ini harus kita lihat dalam praktek etika lesbianisme. Jadi, masalahnya adalah bagaimana demokrasi belajar dari etika de-esensialisasi dalam lesbianisme.

³ Judul buku Eve Sedgwick, *Epistemology of the Closet*, University of California Press, 1992

⁴ Dalam kritik Lacanian, obsesi kita tentang "kebenaran", "keutuhan", "stabilitas" dan "self" adalah sebuah ilusi karena kita sebetulnya tidak punya akses pada "the real". Dengan sia-sia kita proyeksikan obsesi itu kedalam realitas sosial, tetapi semua upaya pemberian struktur, fondasi dan stabilitas akan selalu gagal dan pecah. Itulah nasib sistem ideologi.

Dilihat dari segi politik anti-esensialisme, lesbianisme tumbuh sebagai kritik terhadap feminisme, karena feminisme dianggap tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa patriarkisme itu identik dengan heteroseksual, yang sekaligus berarti hirarki seksual, dengan laki-laki sebagai pusat. Jadi, pada feminisme masih ada prinsip esensialisme, yaitu anggapan bahwa sex berarti relasi heteroseksual. Juga, feminisme kurang peka terhadap pengalaman *women of color* dan *homoseksual*. Dengan kata lain "pengalaman" relasional dalam politik feminisme masih terbatas pada pengalaman heteroseksual, sehingga politik anti patriarki belum sekaligus merupakan kritik terhadap relasi dominasi dalam heteroseksual. Jadi, konsep keadilan dalam feminisme baru pada tahap dekonstruksi politik, dan belum mengenai dekonstruksi seksual.

Bagi lesbianisme, pengalaman relasi homoseksualitas merupakan pengalaman yang menciptakan etika keadilan radikal yang tidak mungkin dimengerti oleh feminisme bila feminisme hanya berhenti pada relasi heteroseksual. Lesbianisme menganggap bahwa demokrasi juga hanya mengenal pengalaman heteroseksual, sehingga konsep keadilan dalam demokrasi juga terbatas pada lingkup prinsip heteroseksual. Dengan kata lain, feminisme dan demokrasi sama-sama masih mempertahankan basis pengaturan sosial berdasarkan konstruksi heteroseksual yang sebetulnya hirarkis, dan karena itu justru mempertahankan susunan masyarakat patriarkis yang merawat relasi heteroseksual itu.

Tuntutan lesbianisme ini sebetulnya sekaligus mendekonstruksi pandangan heteroseksual bahwa seksualitas adalah soal reproduksi saja. Relasi lesbian mencakup suatu kontinum pengalaman yang tidak sekedar pengalaman genitalia. Adrienne Rich menjelaskannya dalam suatu konsep "*lesbian continuum*": "*I mean the term lesbian continuum to include a range- through each woman's life and throughout history -of women-identified experience; not simply the fact that a woman has had or consciously desired genital sexual experience with another woman*"⁵

Konsep "*lesbian continuum*" ini agaknya dimaksudkan untuk menghindari tuduhan bahwa lesbianisme juga jatuh pada esensialisme seksual. Judith Butler misalnya berargumen bahwa kategori-kategori seksual (lesbian, gay, straight) tetap menjadi penanda identitas esensial, dan karena itu "*tend to be instruments of regulatory regimes, whether as the normalizing categories of oppressive structures or as the rallying points for liberatory contestations of the very oppression*"⁶

⁵ Dalam esainya "Compulsory heterosexuality and lesbian existence", dalam bukunya *Blood, Bread and Poetry: Selected Prose, 1979-1985*, Virago, 1987. Kutipan ini saya ambil dari buku Peter Barry, *Beginning Theory*, Manchester Univ. Press, 2002, hal 141.

⁶ Dalam Diana Fuss, *Inside/outside: lesbian theories, gay theories*, hal 14-15. Kutipan ini dan berikutnya ada dalam Peter Barry, *Beginning Theory*, Manchester Univ Press, 2002, hal 144-145

Dengan memperluas kontinum pengalaman itu, lesbianisme berupaya meyakinkan teori demokrasi bahwa etika kesetaraan bukan sekedar kesetaraan hak-hak sipil dan politik, tetapi harus mencakup susunan pengalaman kesetaraan seperti yang dipraktekkan dalam lesbianisme: suatu *ethics of care* yang radikal, yang bekerja pada relasi sosial, dan juga pada relasi seksual. Di sini, konsep politik demokrasi lesbian memegang teguh prinsip bahwa hubungan egaliter merupakan satu-satunya prinsip demokrasi. Dan nilai ini sekaligus merupakan peralatan untuk menolak penindasan. Hoagland dalam *Lesbian Ethics* menyebutnya sebagai nilai yang tumbuh dari "*lesbian context*" yang juga ia sebut sebagai "*an energy field capable of resisting oppression.*"⁷

Jadi pertanyaannya sekarang adalah: dapatkah demokrasi melayani jenis pengalaman yang secara konvensional tidak ia kenal? Yaitu pengalaman egalitarian lesbian. Dengan kata lain, *universe* dari demokrasi yang cenderung unitaristis, esensialistis dan fondasionistis, dipaksa untuk menerima kondisi falibilis, *decentered* dan anti finalitas. Di sini *playfulness* menjadi satu-satunya kriterium praktek demokrasi. Konsensus-silang harus dimungkinkan terjadi dalam praktek demokrasi, yang berarti lepasnya politik dari identifikasi vertikal (yaitu politik yang berbasis ideologi-ideologi absolut). Inilah politik radikal yang diajukan lesbianisme pada teori demokrasi.

Isi dari *lesbian ethics* bukan sekedar hasil translokasi nilai, yaitu dengan membalikkan konstruksi oposisi biner sebuah nilai (yang buruk diputar menjadi yang baik, sehingga homoseksualitas misalnya dianggap lebih utama ketimbang heteroseksual), tetapi sekaligus membongkar konstruksi oposisi biner itu, dan menggantinya dengan prinsip *game* dan *playfulness*. Di sini kita masuk dalam suatu kondisi *hermeneutics of suspicion*, yaitu memperlakukan nilai dalam seluruh kemungkinan ketidakpastiannya. Karena itu, kedudukan sebuah nilai tidak lagi ditentukan oleh kondisi absolutnya (baik atau buruk) tetapi pada kondisi fungsionalnya (berguna atau tidak) bagi perkembangan kebebasan individu. Di dalam relasi lesbian, nilai itu dicapai untuk dua tujuan: mengikat konsensus kesetaraan diantara mereka dan menjadikan konsensus itu sebagai perlawanan politik terhadap nilai-nilai absolut. Jadi, bukan saja nilai itu dibuat dalam kesepakatan, tetapi sekaligus ia mengambil risiko untuk bertentangan dengan nilai-nilai final. Model inilah yang diusulkan untuk meradikalisir konsep pluralitas dalam demokrasi.

Queer politics melanjutkan konsekwensi *playfulness* ini, melewati "pengalaman lesbianisme". Artinya, pada lesbianisme masih terkandung residu esensialisme karena memperlakukan "lesbianisme" sebagai sebuah kategori yang definitif, yang berfungsi sebagai –dalam istilah Bonnie Zimmerman– "*transcendental signifier*", yaitu seolah-olah kategori ini berlaku secara konstan dalam sejarah.⁸ *Queer politics* menolak lesbianisme dan memilih mengeksplorasi sebuah relasi antara seorang

⁷ "Feminist Ethics" *Stanford Encyclopedia of Philosophy*,

⁸ Dibahas dalam Peter Barry, *ibid.* hal. 142

lesbian dengan seorang gay, dalam upaya menghasilkan pengalaman etis radikal sebagai model kesetaraan demokratis. Dengan cara ini *queer politics* menolak relasi heteroseksual (pada feminisme) sekaligus homoseksual (pada lesbianisme). Bagi *queer politics*, relasi antara seorang lesbian dan seorang gay, menghasilkan sistem etika yang sangat berbeda dari sistem etika heteroseksual maupun homoseksual. *Difference* semacam inilah yang ingin diujikan *queer politics* ke dalam demokrasi.

4

Ketegangan kebudayaan terus berlanjut dalam situasi dunia posmoderen. Ketegangan itu terutama menyangkut nilai-nilai baru yang terus mengalir dari pengalaman komunikasi global-virtual. Seksualitas tidak lagi didefinisikan dalam naturalitasnya (stabil, universal, reproduktif, esensial), melainkan sebagai kategori yang fleksibel (dapat dipilih, konsensual, interpretatif, dan "*in the making*"). Dibelakang fenomena ini bekerja suatu antropologi kecemasan, yaitu ketidakmungkinan kita tentang kebenaran moral, kepastian identitas dan rasionalitas pengetahuan. Resonansi dari kecemasan ini juga masuk dalam perbincangan tentang kondisi politik demokrasi. Banyak hal yang memang harus diralat dalam teori demokrasi karena kita sekarang sedang mengalami suatu "transvaluasi nilai" (Nietzsche mengucapkannya seabad lalu).

Paham konvensional demokrasi membatasi partisipasi politik pada kepentingan nilai-nilai mayoritas. Di situ, prinsip kewarganegaraan tidak mengakomodir *intimacy* sebagai nilai yang memerlukan perlindungan hukum. Moralitas politik ini memang paralel dengan sistem patriarki-heteroseksual. Tetapi konstruksi moralitas politik ini tentu adalah suatu produk sosio-historis. Kondisi ini yang kini sedang berubah, seperti dicatat Ken Plummer dalam *Intimacy Citizenship: "Contemporary culture flows of intimacies bringing with them tensions, contradictions, anxieties, and contestations which some critics may see as signs of breakdown and moral chaos. They urge a return to the apparent safety of tradition, but for me this is a world now lost. There can be no turning back the clock. We are a moment in history when the changes underway offer us the potential to create new ethical ways of living."*⁹

Jenis pengalaman kemanusiaan seperti pada feminisme, lesbianisme dan *queer* adalah kekayaan relasi manusia yang justru membuat "manusia" terus berada dalam kondisi "*in the making*". Transaksi sosial, hukum dan politik yang terlambat memahami fenomena *intimacy* ini, justru akan memiskinkan kemanusiaan. Koreksi pada teori demokrasi selalu dimungkinkan karena demokrasi itu sendiri selalu berada dalam kondisi "ketidakcukupan dan harapan". Guillermo O'Donnell¹⁰, teoretisi dan kritisi perkembangan demokrasi merumuskannya begini: "*Democracy always projects a horizon of both hope and dissatisfaction. Because it is grounded on the various dimensions of citizenship, and on the notion of intrinsic human dignity that those*

⁹ Dikutip dari review Stephenie L. Brook, *Sex Roles: A Journal of Research*, Oktober 2004

¹⁰ O'Donnell mengucapkan pidato ini dalam acara penganugerahan pertama Life Achievement Award dari International Political Science Association (IPSA) untuk kontribusinya pada kemajuan ilmu politik, Juli 2006 pada World Congress of Political Science di Fukoka, Jepang. Lihat dalam *Journal of Democracy*, January 2007, vol. 18, no.1, hal 5-11.

dimensions entail, democracy always posits an open horizon." Kesadaran semacam ini paralel dengan kondisi kemanusiaan posmodern, yaitu berlangsungnya pertemuan intensif diantara berbagai "difference", dan karena itu kondisi demokrasi akan terus berada dalam –istilah O'Donnell- *"the perpetual absence of something more"*. Di dalam horison inilah kita dapat tempatkan gagasan "*intimacy citizenship*" itu sebagai praktek kewarganegaraan baru yang lebih kaya dari kondisi kewarganegaraan konvensional. Di sini yang dituntut bukan sekedar pelembagaan hukum dan politiknya, tetapi juga sikap kebudayaan yang penuh *respect*.

Teori demokrasi memang terus mengalami koreksi dengan memperhatikan pikiran-pikiran minoritas dan isu-isu ketidakadilan. Beragam konsepsi deliberatif, afirmatif, dan multikultural sedang diupayakan untuk menampung ledakan pluralitas nilai dan pengalaman hibriditas kewarganegaraan kontemporer. Juga ada debat filosofis yang amat keras untuk menguji konsekuensi-konsekuensi teoretis dari kondisi posmodern terhadap pengaturan institusi politik kewarganegaraan. Begitu juga secara khusus dalam diskursus politik feminisme berlangsung persaingan pikiran dalam merumuskan tujuan filosofis dari politik perempuan. Tingkat percakapan demokrasi memang telah dinaikkan untuk melayani kecepatan perubahan nilai, kepentingan dan identitas di dalam dunia yang *virtual-nomadic* sekarang ini. Tetapi soal yang amat kongkrit dalam perjuangan demokrasi, adalah apa yang diterangkan Audre Lorde: *It is not difference which immobilizes us, but silence. And there are so many silences to be broken.*

5

Jadi, sebetulnya teori queer memberikan model analisis sekaligus mengajukan kritik terhadap politik identitas. Politik identitas menutup percakapan demokratis. Queer membukanya kembali, dan bahkan meradikalisirnya. Dengan fasilitas teoretis yang radikal, queer menghidupkan lagi debat tentang "Identitas", dalam upaya mempersoalkan semua dikotomi sosial yang dibuat untuk maksud -atau dengan akibat- diskriminasi. Soal penting yang akhirnya harus diingatkan lagi adalah bahwa dalam upaya memperjuangkan suatu "*intimacy citizenship*", bukan hak-hak seksual semata yang hendak dicapai, tapi juga etika keadilan yang dihasilkan oleh pengalaman ketubuhan, yang didalamnya juga berisi pengalaman politik kesetaraan. Dengan demikian, demokrasi dapat diyakinkan bahwa *respect* adalah nilai yang dapat dihasilkan di wilayah privat untuk dipakai menjaga ruang ketidak-sempurnaan demokrasi. ***